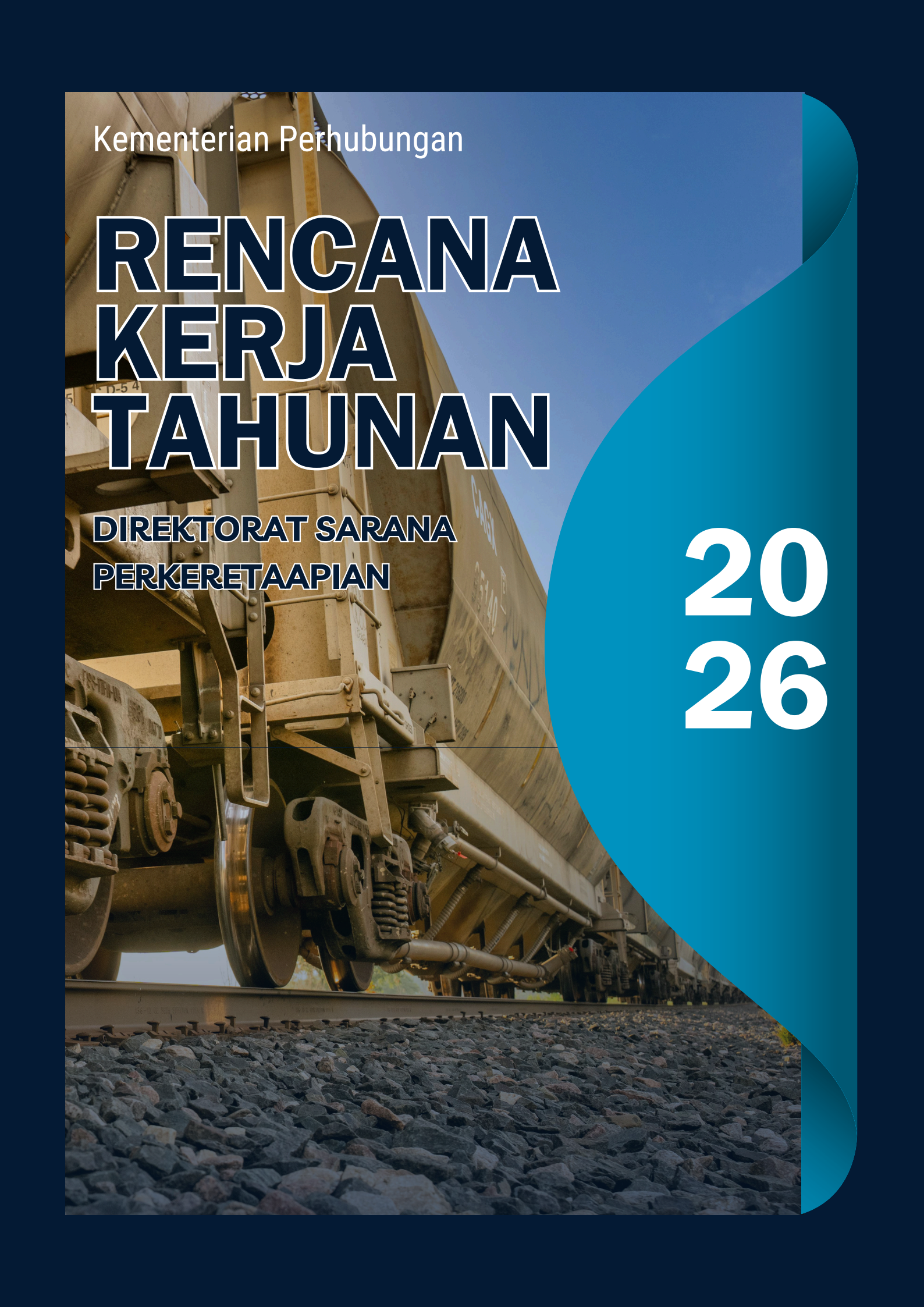


The background of the cover is a photograph of a train on tracks. The train is a freight train with several yellow and grey railcars. The tracks are made of steel rails on a bed of dark grey gravel. The sky is a clear, pale blue. On the right side of the cover, there is a large, stylized graphic of a blue and teal wave or ribbon that curves upwards and to the right, partially obscuring the train image.

Kementerian Perhubungan

RENCANA KERJA TAHUNAN

DIREKTORAT SARANA
PERKERETAAPIAN

20
26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia – Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran di Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2025-2029.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pembangunan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, Januari 2026

Pt. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



MOCHAMAD ANDI HARY MURTY, S.E., M.M.

NIP 1975 07312002121001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Organisasi dan Tupoksi Direktorat Sarana Perkeretaapian	3
BAB II. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DAN INDIKATOR KINERJA	6
2. 1. Pagu dan Realisasi Keuangan	6
2. 2. Capaian Indikator Kinerja.....	6
BAB III. RENCANA STRATEGIS	11
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan	11
3.2. Sasaran Strategi dan Kebijakan Pencapaian	12
3.3. Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian.....	17
3.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	17
BAB IV. PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terdiri dari peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

1.2 LATAR BELAKANG

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 Bidang Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 yang merumuskan prioritas-prioritas kegiatan tahun 2026 serta sasaran kegiatan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan bidang perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian yang merupakan bagian penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 ini dimaksud untuk menerapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2026.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diterapkan pada konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 Bidang Perkeretaapian.

1.4 Organisasi dan Tupoksi Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas

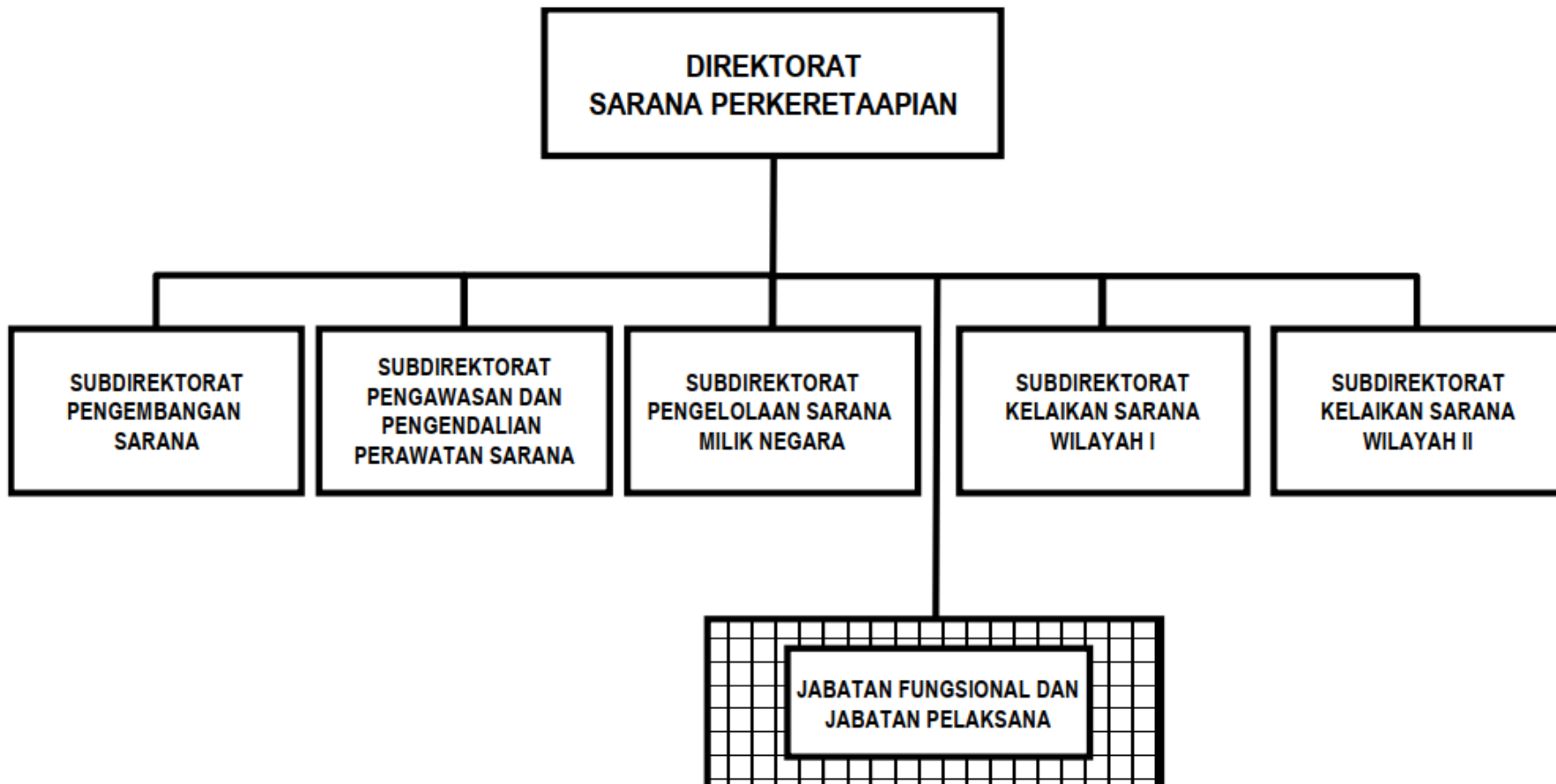
- pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
 - e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Susunan Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- e. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN



BAB II. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DAN INDIKATOR KINERJA

2. 1. Pagu dan Realisasi Keuangan

Daftar pagu dan realisasi belanja Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian tahun 2022-2025 :

Table 2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian tahun
2022-2025

Tahun	Pagu DIPA	Pagu	Realisasi	Tingkat Penyerapan Anggaran
2020	138.830.927.000	14.974.155.000	14.707.254.414,00	98,22%
2021	133.981.082.000	115.539.542.000	114.985.011.877,00	99,52%
2022	34.244.653.000	48.712.284.000	48.277.443.909,00	99,11%
2023	81.546.079.000	81.546.079.000	80.454.542.769	98,66%
2024	136.685.081.000	110.817.418.000	103.782.813.776	93,65%
2025	24.387.687.000	22.476.154.000	22.475.838.658	99,999%

Dapat disampaikan bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 98,19%.

2. 2. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2020-2024, capaian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Table 2.1 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan 2020 dan 2021		Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan PK 2023 dan 2024		Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SK. 1	Meningkatnya Fasilitas Sarana Perkeretaapian mendukung konektivitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	Dokumen	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	Persen	2	2	0	■	100	100	66,67	66,67	66,67	66,67
SK. 2	Meningkatnya Kapasitas Sarana Pendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK S2	Jumlah Modifikasi Sarana pendukung Pelayanan Perkeretaapian	Unit	IKK S2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	12	12	28	28	10	■	3,2	3,2	3,7	3,66
SK. 3	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Persentase pemenuhan unit sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian	Unit	IKK S3.1	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	Persen	-	■	-	▲	69,7	95,45	83,86	86,36	100	99,56

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan 2020 dan 2021	Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan PK 2023 dan 2024		Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		IKK S3.2	Jumlah kilometer tempuh pemenuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara	km tempuh	-	-	7.500	6.545,16	7,5	▲	7,5	▲	7,5	▲	7,5	▲
		IKK S3.3	Jumlah Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Sertifikat	IKK S3.2	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	3.000	2.599	7500	7.441	58,33	97,83	76,19	76,19	82,86	119,4
		IKK S3.4	Persentase Sarana Perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/temuan miror	Unit	IKK S3.4	Persentase Sarana Perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/temuan miror	3.000	1.316	3.000	92,40%	90	92,3	90	90	91	96
		IKK S3.5	Pemenuhan sarana penguasaan untuk pelayanan perkeretaapian	Unit	-	-		pengadaaan : 0 unit pengoperasian : 6.545,164 km tempuh	30,30%	30,3%	69,70%	58,33%	86,36%	96,99%	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan 2020 dan 2021		Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan PK 2023 dan 2024		Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		IKK S3.6	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Dokumen	-	-		4	1	17	■	24	4	29	7	100	100
					IKK S3.7	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	66,67	70,37	88,89	88,89	100	100
SK. 4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Di rektorat Sarana perkeretaapian	Rupiah	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana perkeretaapian	Persen	●	98,22%	●	99,76%	99,54	99,55	90	90	86,4	84,82
		IKK S4.2	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	Persen	IKK S4.2	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	Persen	12,29 M	132%	21,3 M	209,05%	100	120,23	100	100	100	105,15
					IKK S4.3	Nilai AKIP Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	-	-	-	-	-	-	80	80	80,6	81,2

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan 2020 dan 2021		Satuan	Indikator Kinerja Kegiatan PK 2023 dan 2024		Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
					IKKS 4.4	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3

Keterangan:



Kegiatan tidak terlaksana refocusing anggaran



Adanya penggabungan kegiatan pengadaan dan pengoperasian pada IKK pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara



Penentuan terget berdasarkan prognosa tahun berjalan

BAB III. RENCANA STRATEGIS

3. 1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan umum penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Efektifitas Perumusan Kebijakan Sarana Perkeretaapian.
- b. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Regulator : Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab; Operator Sarana : KAI, KCI, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro; Produsen Sarana : INKA)
- c. Penyusunan NSPK regulasi terkait sarana perkeretaapian yang adaptif dengan perkembangan teknologi.
- d. Peningkatan Ketersediaan dan Kapasitas sarana perkeretaapian.
- e. Penguatan fungsi sarana untuk mendukung konektivitas
- f. Peningkatan keberlanjutan sarana perkeretaapian
- g. Penguatan pelayanan logistik dalam mendukung konektivitas nasional
- h. Peningkatan standar pelayanan publik
- i. Penguatan sistem digitalisasi layanan
- j. Penguatan sistem pengawasan sarana perkeretaapian
- k. Peningkatan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian
- l. Pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi
- m. Peningkatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan monitoring program kerja Direktorat sarana perkeretaapian
- n. Peningkatan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat sarana perkeretaapian
- o. Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi (teknis dan administratif) SDM Direktorat sarana perkeretaapian sesuai standar kompetensi/keahlian khusus organisasi
- p. Peningkatan pengelolaan layanan publik di lingkungan Direktorat sarana perkeretaapian.

3.2. Sasaran Strategi Dan Kebijakan Pencapaian

Strategi pembangunan di bidang sarana perkeretaapian tahun 2025-2029, yaitu

:

NO	SASARAN	Arah Kebijakan	STRATEGI IMPLEMENTASI
1.	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang sarana/fasilitas sarana perkeretaapian yang mendukung konektivitas perkeretaapian.	1. Peningkatan Efektifitas Perumusan Kebijakan Sarana Perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan studi dan analisis kondisi sarana perkeretaapian yang mencakup usia operasional, kapasitas, efisiensi dan tingkat utilisasi sarana • Peningkatan sistem digitalisasi data sarana perkeretaapian untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. • Peningkatan publikasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan portal publik dan laporan reguler kepada stakeholders utama.
		2. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Regulator : Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab; Operator Sarana : KAI, KCI, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro; Produsen Sarana : INKA)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan (Regulator: Kemenhub, BRIN, Kemenperin, Kemendagri, Pemprov, Pemkot, Pemkab; Operator sarana : KAI, KCI, KCIC, MRT, LRT Palembang, LRT Jabodebek, LRT Jakpro; Produsen sarana : INKA)
		3. Penyusunan NSPK regulasi terkait sarana perkeretaapian yang adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan NSPK

		dengan perkembangan teknologi.	
2.	Meningkatnya kapasitas sarana perkeretaapian yang mendukung layanan perkeretaapian	4. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana perkeretaapian seperti lokomotif modern dan kereta penumpang yang sesuai dengan pertumbuhan demand transportasi. • Peremajaan dan merekondisi sarana tua dengan mengadopsi standar teknologi terbaru
		5. Penguatan fungsi sarana untuk mendukung konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi antar-moda transportasi di stasiun kereta. • Optimalisasi kerja sama dengan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk mendukung pengadaan dan pengelolaan sarana perkeretaapian
		6. Peningkatan keberlanjutan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan mekanisme monitoring berkala terhadap kinerja sarana perkeretaapian dengan menggunakan indikator seperti tingkat keterisian (load factor), waktu operasional, frekuensi perjalanan.
		7. Penguatan pelayanan logistik dalam mendukung konektivitas nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peluang investasi bagi sektor swasta untuk mendukung pengembangan sarana perkeretaapian yang strategis. • Peningkatan sarana perkeretaapian untuk daerah-daerah yang membutuhkan akses transportasi kereta api, terutama di wilayah hinterland, kawasan industri dan pelabuhan barang.
3.	Meningkatnya kinerja layanan publik Direktorat Sarana Perkeretaapian	8. Peningkatan standar pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan SOP pelayanan publik Direktorat Sarana Perkeretaapian • Sosialisasi SOP pelayanan publik Direktorat Sarana
		9. Penguatan sistem digitalisasi layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan platform digital berbasis interoperabilitas untuk mempermudah pengajuan,

			<p>pengelolaan dan tindak lanjut layanan sarana perkeretaapian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi layanan publik Direktorat sarana ke dalam aplikasi atau portal terpadu milik Kemenhub.
4.	Meningkatnya pengawasan dan kelaikan sarana perkeretaapian	10. Penguatan sistem pengawasan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar kelaikan sarana perkeretaapian yang sesuai dengan perkembangan teknologi
		11. Peningkatan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas laboratorium atau peralatan pengujian kelaikan modern yang dapat mendukung kegiatan inspeksi teknis dan pengawasan di lapangan. • Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder dalam melakukan pengujian kelaikansarana perkeretaapian • Sosialisasi regulasi dan pentingnya kelaikan sarana kepada operator kereta api
		12. Pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem berbasis aplikasi untuk mendokumentasikan dan memantau hasil pengawasan kelaikan sarana perkeretaapian.
5.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Dit. Sarana Perkeretaapian.	13. Peningkatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan monitoring program kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terintegrasi • Peningkatan SDM DSP di bidang administratif ketatausahaan.
		14. Peningkatan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan DSP
		15. Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan DSP.

		(teknis dan administratif) SDM DSP sesuai standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital.
		16. Peningkatan pengelolaan layanan publik di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi administrasi dan teknis dilingkungan DSP • Pengintegrasian sistem dan pengelolaan database/big data DSP

BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Penjabaran Rencana Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Tahun 2026 disusun sesuai dengan konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

3.1. Visi Dan Misi Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi “Terwujudnya Sarana Perkeretaapian yang Maju (handal, selamat, berteknologi, berdaya saing, bersinergi dengan industri, mampu menjawab tantangan perkembangan) menuju Indonesia Emas 2045”. Frasa “Sarana Perkeretaapian Yang Maju” merupakan adaptasi dari RIPNAS, meliputi:

- Handal, diindikasikan kualitas pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman dengan konektivitas, kapasitas dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- Selamat, diindikasikan tercapainya standar keamanan tertinggi untuk melindungi penumpang, awak pada sarana perkeretaapian.
- Berteknologi, diindikasikan menekankan pada pemanfaatan teknologi canggih dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
- Berdaya saing, menciptakan sistem transportasi kereta api yang efisien dan dapat bersaing dengan moda transportasi lainnya di pasar domestik maupun internasional.
- Bersinergi dengan industri, untuk membangun kemitraan yang kuat dan saling mendukung dengan berbagai sektor industri.
- Mampu menjawab tantangan perkembangan, diindikasikan berkomitmen untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perubahan di berbagai aspek, termasuk teknologi, kebutuhan pasar, regulasi dan dinamika global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sarana perkeretaapian yang menunjang konektivitas dan layanan perkeretaapian
- b. Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal

3.2. Tujuan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Tujuan Direktorat Sarana perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sarana perkeretaapian yang maju
- b. Terlaksananya peyelenggaraan sarana perkeretaapian yang mendukung konektivitas dan layanan perkeretaapian
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governannce dan Clean Government di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

3.3. Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran pembangunan Direktorat Sarana perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang sarana/fasilitas sarana perkeretaapian yang mendukung konektivitas perkeretaapian.
- b. Meningkatnya kapasitas sarana perkeretaapian yang mendukung layanan perkeretaapian.
- c. Meningkatnya kinerja layanan publik Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- d. Meningkatnya pengawasan dan kelaikan sarana perkeretaapian.
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Dit. Sarana Perkeretaapian.

3.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian berikut :

- a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya konektivitas sarana perkeretaapian.
 - 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian.

Target : di tahun 2026 IKK Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas sarana perkeretaapian memiliki target 70, 139% dimana memiliki target 16 dokumen perencanaan teknis yang terdiri dari 6 dokumen Spesifikasi Teknis Sarana, 3 dokumen Rancang Bangun dan 3 dokumen Rekayasa. Target anggaran kegiatan ini yaitu:

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 978.476.000
1. Monitoring Pengendalian Mutu, Rancang Bangun dan Rekayasa	Rp. 978.476.000

- b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 3,71 (sangat baik) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4).

- c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian.

Target : Jumlah sarana perkeretaapian di wilayah I dan wilayah II yang dilakukan sertifikasi kelaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total sarana aktif di wilayah I dan wilayah II. IKK ini memiliki target kinerja 80,94% dengan target sertifikasi wilayah I berjumlah 5450 sertifikat dan wilayah II 6150 sertifikat dibandingkan indikasi jumlah sarana aktif tahun 2026 sebanyak 14332 sarana aktif. Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yang mendukung, yaitu:

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 1.767.014.000
Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	Rp. 150.448.000
Sertifikasi Kelaikan Sarana Wilayah II (4800 sertifikat)	Rp. 345.200.000
Supervisi Pengujian Sarana Perkeretaapian Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Dan Papua)	Rp 486.115.000
Supervisi Pengujian Sarana Perkeretaapian Wilayah II	RP 785.251.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian

Target : IKK ini menghitung NSPK yang ada pada direktorat sarana perkeretaapian yaitu sejumlah 30 NSPK, ditambah dengan NSPK target pada tahun berjalan sejumlah 17 NSPK dibandingkan dengan NSPK baseline ditambah dengan jumlah target NSPK tahun 2025-2029. Rincian NSPK pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 20.113.564.000
Kajian tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis pada Sarana Perkeretaapian	Rp. 1.200.000.000
Kajian Tata Cara Evaluasi Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	Rp. 1.200.000.000
Studi Standarisasi dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp 1.000.000.000
Studi Penyusunan Konsep SNI yang Bersumber dari JIS E4041 : 2019 dan IEC 61133 - 2016 (Testing of Rolling Stock on Completion of Co	RP 1.200.000.000

Studi Standarisasi Manufaktur Sarana Perkeretaapian	RP	1.500.000.000
Kajian Alternatif Skema Pengadaan Sarana Perkeretaapian	RP	1.000.000.000
Studi Standar Spesifikasi Teknis Kereta Levitasi Magnet	RP	1.500.000.000
Studi Standarisasi Komponen Sarana Perkeretaapian	RP	1.200.000.000
Studi Standar Peralatan Fasilitas dan Tata Cara Pemeriksaan dan Perawatan komponen Bearing Sarana Perkeretaapian Kecepatan Normal	RP	1.200.000.000
Studi Kajian Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana perkeretaapian	RP	1.200.000.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Inspeksi	RP	970.016.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Perawatan dan Pemeriksaan Kereta Ukur	RP	965.072.000
Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia SDM Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	RP	978.476.000
Kajian Penyusunan Pedoman Rancang bangun dan Rekayasa Komponen Sarana Perkeretaapian	RP	1.000.000.000
Kajian Teknologi Gerbong Angkutan Kendaraan (Rolla)	RP	2.000.000.000
Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA Railroad	RP	1.000.000.000
Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	RP	1.000.000.000

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target : Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara sampai tahun berjalan dengan bobot 50% dan pemenuhan pengoperasian sarana perkeretaapian pada tahun berjalan dengan bobot 50%. Tahun 2026 memiliki target pengoperasian sarana milik negara sejumlah 20 unit pengoperasian dan tidak ada target pemenuhan sarana milik pada dipa 2026 dengan detail anggaran sebagai berikut :

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 4.500.000.000
Pengoperasian Sarana Milik Negara	Rp. 4.500.000.000

4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck.

Target : Jumlah sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti perbaikan/pemenuhan sesuai hasil rampcheck dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil tidak baik/temuan major/butuh perbaikan pada tahun berjalan

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 635.568.000
Pelaksanaan Rampcheck Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretaapian	Rp. 486.614.000
Pelaksanaan Rampcheck Angkutan Barang	Rp 148.954.000

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti.

Target : Merupakan salah satu parameter untuk mengetahui perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian, dimana ditargetkan pada tahun 2026 terdapat 100% temuan sudah ditindaklanjuti. Tahun 2026 ikk ini dianggarkan sebagai berikut :

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 223.487.000
--------------------------	------------------------

Pengawasan Perawatan, Tempat Dan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian Di Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp. 223.487.000
--	-----------------

d. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian

1. Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1 100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Tahun 2026 ditargetkan untuk nilai AKIP dengan nilai 81,25 dengan anggaran sebagai berikut :

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 204.183.000
Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp 167.093.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola/Direktorat	Rp 37.090.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Ditargetkan untuk Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 dengan nilai 13.75 dengan anggaran sebagai berikut :

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 60.428.000
---------------------------------	-----------------------

Penyusunan SPIP dan Manajemen Resiko Balai Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp 60.428.000
--	---------------

3. Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:

- Capaian Output sebesar 43,5 persen;
- Efisiensi sebesar 28,6 persen;
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;
- Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:

- Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;
- 80% - 90% : Kategori Baik;
- 60% - 80% : Kategori Cukup;
- 50% - 60% : Kategori Kurang;
- Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang

Untuk tahun 2026 target kinerja ini dengan persentase sebesar 86,75% dengan rincian anggaran sebagai berikut:

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp. 46.493.823.000
Perawatan Sarana Milik Negara	Rp 33.155.759.000
Layanan Perkantoran Satker Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Rp 158.207.000
Layanan Perkantoran Satker Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian (Sewa Dan Pemeliharaan)	Rp 1.214.580.000
Administrasi Dan Layanan Kantor Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp 74.841.000

Administrasi Dan Layanan Kantor Direktorat Sarana Perkeretaapian (Sewa Dan Pemeliharaan)	Rp	753.632.000
Pelaksanaan Kegiatan Dan Honor Operasional Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Rp	186.084.000
Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	1.712.724.000
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Dan Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp	380.271.000
Monitoring Pengendalian Mutu, Rancang Bangun Dan Rekayasa	Rp	370.957.000
Kegiatan Pengadaan 1 (Satu) Paket Peralatan Inspeksi Kelaikan Sarana Wilayah I	Rp	375.000.000
Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Rampcheck Sarana Perkeretaapian	Rp	180.095.000
Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Dan Supervisi Sarana Perkeretaapian	Rp	151.623.000
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp	301.390.000
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	Rp	559.317.000
Kegiatan Monitoring Perawatan Sarana Milik Negara	Rp	628.620.000
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Rp	613.208.000
Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian Di Wilayah I	Rp	61.870.000
Evaluasi Dan Pelaporan Kelaikan Sarana Wilayah II	Rp	232.998.000
Inspeksi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Dan Papua)	Rp	807.400.000
Inspeksi Sarana Perkeretaapian Di Wilayah II	Rp	616.795.000

Monitoring Dan Rekonsiliasi Data Identitas Sarana Perkeretaapian	Rp	197.197.000
Bimbingan Teknis Di Bidang Kelaikan Sarana Wilayah I	Rp	114.600.000
Bimbingan Teknis Di Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah li	Rp	137.800.000
Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Proses Manufaktur Sarana Perkeretaapian	Rp	344.576.000
Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Sarana Perkeretaapian	Rp	229.033.000
Bimbingan Teknis/Rapat Dan Workshop Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Rp	199.449.000
Transfer Knowledge Kelaikan Sarana Otomatis	Rp	1.307.339.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Rp	112.695.000
Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp	177.528.000
Kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sai)	Rp	61.350.000
Kegiatan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (Sabmn)	Rp	59.380.000
Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data Dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp	17.005.000
Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data Dan Komunikasi Satker PPSP	Rp	180.500.000
Langganan Software Multimedia	Rp	20.000.000
Pengembangan/Upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (SISAKA)	Rp	800.000.000

4. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Jumlah realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. Tahun 2026 ditargetkan untuk capaian PNBP sejumlah Rp. 1.500.000.000,-.

5. Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 130 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kepka Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Penyelenggaraan Kearsipan. Tahun 2026 Direktorat Sarana Perkeretaapian menargetkan untuk kearsipan dengan nilai 65 dengan rincian anggaran :

TOTAL ANGGARAN BERJUMLAH	Rp.	129.101.000
Pengelolaan, Pengolahan dan Penyajian Arsip Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Rp	129.101.000

BAB IV. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian tahun 2026 semata-mata disusun berdasarkan Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025-2029. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Renstra Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya konektivitas sarana perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,78
2	Meningkatnya pelayanan bidang sarana perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,25
3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,85
		Persentase pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25
		Persentase pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	71,01
		Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	%	94,60
		Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,80
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Nilai	13,75

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
		Direktorat Sarana Perkeretaapian		
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,75
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.	%	100
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65